



Kamis, 18 Februari 2016 06:00

## **Memburu Gratifikasi di Gunung Botak**



**DELAPAN** jaksa senior dari Gedung Bundar mendadak diturunkan ke Gunung Botak. Pekan ini, Menkopolkum dijadwalkan bakal berkunjung disana. Bau amis ada dana “haram” gratifikasi mengalir pun mengemuka. Siapa penikmatnya?

Keberadaan tambang emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru menjadi magnet bukan hanya bagi pengusaha maupun penambang. Pejabat di daerah ini juga tergiur kandungan emas yang melimpah disana.

Cerita soal tambang emas di Gunung Botak sepertinya tidak pernah habis. Sejak mulai dirambah penambang Oktober 2011 lalu, nama Gunung Botak begitu kesohor di negara ini. Diperkirakan sudah puluhan nyawa melayang akibat rebutan lahan tambang yang memaksa pemerintah akhirnya menutupnya.

Untuk menghindari tindakan kriminal berulang, Pemerintah Provinsi Maluku mengambil alih pengolahan tambang akhir tahun 2015, pasca penutupan tambang emas di Gunung Botak.

Namun kabar tak sedap mulai tersiar pasca Pemprov Maluku menggandeng dua perusahaan untuk melakukan eksploitasi di kawasan tambang emas Gunung Botak.

Pemerintah Provinsi Maluku menunjuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku berkongsi atau menjalin kerja sama dengan PT Buana Pratama Sejahtera (PT BPS).

Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy ditunjuk sebagai ujung tombak untuk membangun kerja sama dengan PT BPS. Perusahaan milik pengusaha asal Sumatera Utara yang disebut-sebut kerabat salah satu taipan di Indonesia Tomi Winata ini ditugaskan untuk mengelola sedimen. Sedimen yang mengandung emas ini diambil dari sejumlah titik di Daerah Aliran Sungai (DAS) Waeapo, Buru.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Maluku menjalin kerja sama dengan PT Citra Cipta Prima (PT CCP). Perusahaan yang dimiliki pengusaha dari luar Maluku ini juga ditugaskan menggarap kawasan tambang emas Gunung Botak.

Salah satu pejabat di Dinas PU Maluku, Megy menjadi penanggung jawab kerja sama dengan PT CCP).



## **SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

### **MEDIA : KABAR TIMUR**

Kerjasama Pemprov dengan dua perusahaan ini ternyata tidak gratis. Konon bos dua perusahaan itu harus menyerahkan fulus yang jumlahnya tidak sedikit. Ke kantong siapa uang gratifikasi atau suap mengalir belum diketahui pasti.

Ternyata rumor tentang gratifikasi itu terdengar hingga ke Gedung Bundar di Jakarta. Apakah terkait aliran uang panas itu, belum diketahui pasti. Namun Jaksa Agung H.M. Prasetyo mendadak mengutus anak buahnya ke Kota Ambon, Selasa (16/2).

Politisi Partai Nasdem ini mengirim 8 jaksa senior bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Sehari tiba di Ambon, Rabu (17/2) pagi tim Kejagung mulai bekerja. Mereka bergerak menuju Pulau Buru menggunakan kapal cepat Siwalima milik Pemprov Maluku.

Selama kunjungan ke Pulau Buru, tim Kejagung didampingi Kasi I Kejati Maluku, Adrianus. Tiba di Pulau Buru, tim jaksa Kejagung langsung bergerak menuju kawasan tambang emas Gunung Botak, Kecamatan Teluk Kayeli.

Dalam kunjungan "kilat" ke Gunung Botak tim Kejagung didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Namlea dan sejumlah Muspida Kabupaten Buru. Mereka menyempatkan mengunjungi lokasi PT BPS. Sore harinya mereka telah kembali ke Ambon.

Belum diketahui pasti maksud kunjungan tim Kejagung ke Bumi Bupolo ini. Namun informasi yang dihimpun Kabar Timur menyebutkan, tim Kejagung tengah menelisik dugaan suap dari dua perusahaan tersebut kepada sejumlah pejabat di daerah ini.

Tim sedang mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) dan data untuk mulai menyelidiki kasus ini. "Kunjungan mereka (tim kejagung) terkait gratifikasi dari perusahaan tambang kepada pejabat di Maluku," ujar sumber Kabar Timur, kemarin.

Belum ada keterangan resmi dari tim Kejagung sehubungan kunjungan cepat mereka ke Gunung Botak. Namun sebelumnya kepada wartawan, Selasa malam di kantornya, Kepala Kejati Maluku, Jan Samuel Maringka menjelaskan kedatangan tim Kejagung untuk melakukan supervisi terhadap masalah-masalah kemasyarakatan.

Tim Kejagung kata Maringka, juga melakukan koordinasi terkait regulasi sumber daya alam di Maluku, termasuk Gunung Botak.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dijadwalkan akan mengunjungi Pulau Buru, pekan ini.

Kunjungan Luhut ini masih terkait tambang ilegal Gunung Botak. "Laporannya begitu (Menkopolkam) akan kunjungi Gunung Botak. Kalau tidak beliau, mungkin stafnya. Kepentingannya apa (mengunjungi kawasan Gunung Botak), kami tidak tau," ujar sumber lain di Mapolres Buru. (KTS)



Sabtu, 20 Februari 2016 06:00

## **Tuntaskan Gunung Botak**



**TIM** Intelijen Kejaksaan Agung telah mengumpulkan temuan di lapangan setelah mengunjungi kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Tim beranggotakan tiga jaksa senior ini menyelidiki pembagian kewenangan antara pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru dalam mengolah emas Gunung Botak.

Tim bentukan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung, Adi Toegarisman ini turun ke Gunung Botak setelah menerima laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum Kabupaten Buru.

LSM yang konsen memerangi penambangan illegal di Pulau Buru itu melaporkan berbagai kasus pidana yang terjadi sejak penambang merambah Gunung Botak, tahun 2011 silam. Selain Kejagung, LSM Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum Buru juga memasukan laporan serupa ke Mabes Polri di Jakarta. Laporan dengan perihal yang sama juga ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Ade Komaruddin.

“Surat laporan kepada Jaksa Agung H.M Prasetyo dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti serta tembusan kepada Presiden dan ketua DPR kami serahkan langsung di Jakarta pada 5 Januari 2016,” kata Ketua LSM Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum Kabupaten Buru, La Ode Fenti kepada Kabar Timur, kemarin.

Laporan terpaksa dilayangkan ke petinggi-petinggi negara ini lantaran LSM Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum Kabupaten Buru, tidak lagi mempercayai kinerja aparat penegak hukum di Maluku. “Karena kasus-kasus terkait penambangan illegal, penjualan dan penggunaan sianida dan merkuri secara bebas di Kabupaten Buru yang kami laporkan tidak direspon Polda Maluku maupun Polres Buru,” ungkap Fenti.

Selama kunjungan sehari di Buru, Rabu (17/2), selain sejumlah Muspida Buru, Kasi I Kejati Maluku Adrianus dan Kasi Intel Kejari Namlea Ruslan Marasabessy, sebagai pelapor, LSM Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum juga mendampingi tim Kejagung meninjau langsung kawasan Gunung Botak.

Selain Gunung Botak, tim Kejagung meninjau sejumlah titik di Buru, diantaranya daerah aliran sungai Waeapo yang menjadi lokasi pengangkatan sedimen oleh PT Buana Pratama Sejahtera yang merupakan mitra kerja Dinas ESDM Maluku.



## SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

### MEDIA : KABAR TIMUR

Di Kota Namlea, tim meninjau tumpukan merkuri dan sianida milik Hi. Mundeng yang disimpan di gudang pupuk. Mundeng merupakan distributor utama pemasok merkuri dan sianida di Kabupaten Buru sejak tahun 2011. Bisnisnya benar-benar lumpuh setelah Pemprov Maluku menutup praktek tambang liar di Gunung Botak akhir tahun 2015.

Kunjungan tim dari korps Adhyaksa ke beberapa titik di kabupaten berjudul “Retemene Bara Sehe” ini untuk mengkros cek laporan LSM Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum dengan kondisi di lapangan. “Dan memang temuan tim Kejagung di lapangan sesuai laporan yang kami sampaikan,” kata Fenti.

Fenti berharap laporan yang telah disampaikan ke Mabes Polri dan Kejagung tidak bernasib sama dengan laporan yang disampaikan ke institusi penegak hukum di Maluku. “Kami memberikan apresiasi terhadap Kejagung yang telah menurunkan tim ke Buru menindaklanjuti laporan kami. Tapi kami berharap proses penyelidikan tidak berjalan di tempat apalagi berhenti di tengah jalan,” harapnya.

Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum meminta Gedung Bundar (Kejagung) mengusut tuntas berbagai kasus pidana yang terjadi terkait penambangan ilegal di Pulau Buru. “Saat di Namlea kemarin (Rabu), tim Kejagung menyampaikan kepada kami progress dari penyelidikan kasus ini akan disampaikan kepada kami sebagai pelapor,” tukas Fenti.

Dalam laporan Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum yang ditujukan kepada Kejagung maupun Mabes Polri, Fenti mendesak kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan emas secara serampangan secepatnya ditangani Pemerintah Kabupaten Buru dan Pemprov Maluku. “Harus ada langkah cepat pemerintah daerah memperbaiki kembali kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan emas di Gunung Botak,” katanya.

Soal indikasi gratifikasi dalam pengelolaan tambang emas yang mengalir ke kantong sejumlah pejabat, Fenti menyerahkan sepenuhnya kepada Kejagung untuk menyelidikinya. “Itu kewenangan Kejagung, kalau memang benar ada harus diselidiki,” ujarnya.

Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum juga mendesak Mabes Polri dan Kejagung menangkap pelaku penyebar merkuri dan sianida di Pulau Buru yang selama ini tidak terjamah hukum.

Sianida adalah salah satu jenis bahan kimia yang digunakan perusahaan tambang untuk mengambil emas dari bijih. Bijih dengan sedikit kandungan emas dipecah dan dikumpulkan di tanah, kemudian disiram dengan sianida.

“Pelaku-pelaku pertambangan di Pulau Buru menggunakan sianida dan merkuri tapi tidak pernah ditangkap. Kita berharap Kejagung dan Mabes Polri bersikap tegas terhadap mereka, siapapun yang terlibat harus diproses hukum” desaknya.

Menurutnya sebab akibat dari penggunaan merkuri (Hg) dan sianida (CN) dalam aktivitas penambangan emas menimbulkan pencemaran lingkungan yang akan mengakibatkan terganggunya flora dan fauna yang hidup tidak hanya di kawasan Gunung Botak, tapi Pulau Buru secara keseluruhan.

Sianida sebut dia, adalah zat yang sangat beracun dan dampaknya bisa mengakibatkan kematian. Zat kimia itu sangat berbahaya bukan hanya bagi manusia tapi juga lingkungan.

Selain merusak alam di Buru, orang-orang dan masyarakat yang langsung terpapar paling berisiko. “Janin, dan anak-anak kecil sangat sensitif jika terpapar merkuri maupun sianida, karena sistem saraf mereka masih rawan,” katanya.



## SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

### MEDIA : KABAR TIMUR

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Upaya Kejagung menelisik dugaan gratifikasi dalam pengolahan tambang emas di kawasan Gunung Botak, membawa angin segar bagi sejumlah pihak di Kabupaten Buru.

Ternyata ada kelompok yang diuntungkan dengan isu gratifikasi atau suap yang ditengarai dinikmati sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Maluku.

Kelompok ini pula yang menghembuskan isu kencang soal aliran uang panas ke kantong pejabat di daerah ini. Lalu siapa kelompok ini dan apa tujuannya menghembuskan rumor tersebut?

Informasi yang dihimpun Kabar Timur mengungkapkan, lahan “basah” di tambang illegal Gunung Botak di Teluk Kayeli yang memiliki kandungan emas berlimpah menjadi rebutan Pemerintah Provinsi Maluku yang menggandeng PT Buana Pratama Sejahtera (PT BPS) dengan mafia sianida yang selama ini beroperasi di Buru.

Penutupan tambang emas Gunung Botak oleh pemerintah akhir tahun 2015 lalu ternyata membuat marah mafia sianida. Penutupan tambang membuat bisnis sianida benar-benar mati. Maklum sejak penambang mulai beroperasi di Gunung Botak Oktober 2011 lalu, perputaran uang dari bisnis bahan kimia berbahaya ini mencapai puluhan miliar rupiah tiap bulan.

Sianida yang masuk ke Pulau Buru ketika tambang illegal masih beroperasi, dipasok dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Tiga nama disebut-sebut sebagai pemasok utama sianida di Namlea, ibu kota Kabupaten Buru. Ketiganya warga pendatang dari luar Maluku yang tiba-tiba nongol di Buru setelah Gunung Botak dirambah penambang. Mafia sianida ini adalah, Jefry asal Bandung, Fefry asal Manado dan Hi. Mundeng asal Makassar. Dari tiga nama itu, Mundeng merupakan distributor utama pemasok sianida di Kabupaten Buru.

Untuk menyimpan sianida miliknya, Mundeng menyewa gudang pupuk yang berada di pusat kota Namlea. Nama Mundeng sempat dikaitkan dengan kepemilikan sianida yang dipasok dalam jumlah besar yakni sebanyak satu container.

Bahan kimia berbahaya itu berhasil diamankan oleh tim Ditreskrim Polda Maluku di pelabuhan Namlea pada tahun 2013 lalu. Meski container telah dipasang garis polisi, entah apa sebabnya, proses hukum terhadap kasus ini tidak pernah dilakukan oleh pihak kepolisian, baik oleh Polda Maluku maupun Polres Buru. Mundeng sang pemilik sianida tidak terjamah hukum dan terus mulus menjalankan bisnis sianida.

Di tahun 2014, polisi juga berhasil menyita sianida dalam jumlah yang tidak kalah besar. Sianida ketika itu ditemukan di Unit 18 kecamatan Waeapo, Buru. Sianida dikemas dalam karung dan jerigen. Tapi lagi-lagi kasus ini hilang ditelan bumi. Entah siapa pemiliknya, tapi kabar beredar sianida itu milik salah satu dari tiga nama tersebut yang dijuluki sebagai raja pemasok sianida di Pulau Buru. (KTS/KAF)



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**  
**MEDIA : KABAR TIMUR**